



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MAHYUNADI**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **37076**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.747.000.000**

1. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
2. Tanah Seluas 1.820 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.250 m2/272 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 1.920 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
7. Tanah Seluas 28.798 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 20.420 m2/912 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 16.550 m2/256 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
10. Tanah Seluas 7.500 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
11. Tanah Seluas 36.000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL



SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.192.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 400.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 8.339.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.339.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.